

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Tingkat Persistensi inflasi di Provinsi Sumatera Utara memiliki derajat persistensi yang rendah cenderung sedang. Hal ini terlihat dari koefisien persistensi Provinsi Sumatera Utara yang bernilai 0,55. Nilai tersebut menggambarkan waktu yang diperlukan tingkat inflasi Provinsi Sumatera Utara untuk kembali ke tingkat alamiahnya setelah timbulnya *shock*. Berdasarkan hasil tersebut maka jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk kembali ke nilai alamiahnya yaitu selama lebih dari satu bulan. Sedangkan untuk masing-masing kelompok komoditi memerlukan waktu yang beragam. Kelompok komoditi dengan derajat persistensi inflasi tertinggi adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (PERUM), dengan nilai 0,81 dan memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan lebih untuk kembali ke nilai alamiahnya. Sedangkan kelompok komoditi dengan derajat persistensi inflasi terendah adalah kelompok Transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (TRANS) sebesar 0,28. Bahan makanan (BAMA) sebesar 0,29. Dan Sandang (SAND) dengan nilai derajat persistensi sebesar 0,36 yang memerlukan waktu hanya setengah bulan untuk kembali ke nilai alamiahnya.

2. Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti setelah dibentuknya TPID, tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan.
3. Sama halnya dengan tingkat inflasi di Sumatera Utara. Tingkat suku bunga / *BI rate* mengalami fluktuasi setiap tahun bahkan trendnya mengalami penurunan mengikuti tingkat inflasi yang juga turun. *BI rate* ditetapkan oleh bank sentral sebagai kebijakan untuk menjaga kestabilan tingkat inflasi. Berdasarkan uji kointegrasi, terdapat hubungan keseimbangan dalam jangka panjang antara tingkat inflasi dan suku bunga (*BI rate*). Sementara dalam uji kausalitas memperlihatkan hubungan dua arah atau timbal balik antara tingkat inflasi di Sumatera Utara dengan tingkat suku bunga (*BI rate*).

5.2 Saran

Adapun Saran dari penelitian ini adalah :

1. Disarankan terhadap para pihak terkait khususnya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga perlu memikirkan bentuk pengendalian harga lainnya, seperti cara pencegahan kenaikan harga, salah satunya dengan cara pengoptimalan dalam bersinergi, bekerjasama dan berkomitmen kuat terhadap lembaga lain yang terkait dalam upaya pengendalian laju inflasi daerah.
2. Disarankan dalam upaya pengendalian inflasi daerah terutama pada pengendalian harga kelompok bahan makanan memerlukan kebijakan yang sifatnya struktural, terutama dalam mendorong terjadinya perbaikan dalam pola distribusi pasokan serta dukungan infrastruktur yang memperlancar transportasi dan distribusi barang. Salah satunya dengan pembentukan perusahaan daerah sebagai badan

penyangga pangan yang berperan dalam manajemen distribusi dan pasokan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

3. Disarankan dalam pengendalian inflasi di daerah tidak cukup hanya melakukan pengendalian secara parsial yang fokus pada kelompok komoditas tertentu yang dianggap memberikan kontribusi besar dalam pembentuk inflasi daerah, tetapi juga hendaknya melihat seluruh kelompok komoditas secara simultan. Hal ini karena sifat keterkaitan yang dimiliki antar harga kelompok komoditas pembentuk inflasi yang memiliki kontribusi pada peningkatan inflasi di kelompok komoditas lainnya.
4. Diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan tingkat persistensi inflasi khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang lebih spesifik agar terdapat keberlanjutan tentang analisa perekonomian khususnya hal-hal yang dipengaruhi oleh persistensi inflasi sehingga dapat berimplikasi terhadap kebijakan pengendalian inflasi daerah di Sumatera Utara.